

**RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
TAHUN 2022**



**KABUPATEN FLORES TIMUR
KALIKE, AGUSTUS 2022**

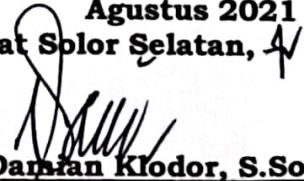
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, kami dapat menyempurnakan rancangan renja tahun terakhir dalam periode RPJMD Periode Tahun 2017-2022.

Pada Bulan Maret 2021, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang lasim disebut Renja OPD yang merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah, telah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpatokan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setelah melalui tahapan dan proses maka Bupati Flores Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, maka berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, tahapan selanjutnya bagi Perangkat Daerah adalah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan melihat kembali indikator, lokasi, target kinerja serta anggaran dengan RKPD yang telah ditetapkan tersebut.

Kami menyadari, bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu maka sangat diharapkan kritik dan saran konstruktif dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), sehingga menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi kami demi penyempurnaan dokumen ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya dan restu Leluhur Lewotana selalu menyertai kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian demi membangun lewotana Flores Timur tercinta.

Kalike, Agustus 2021
Camat Solor Selatan, 

Yoseph Damian Klodor, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196602201999031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	4
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA....	4
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI..	14
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	21
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	22
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	26
BAB V PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

I	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	5
II	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT SOLOR SELATAAN KABUPATEN FLORES TIMUR.....	10
III	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR.	17
IV	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini disusun berdasarkan amanat Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penunjang Perencanaan, setelah melalui konsultasi publik dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), disusunlah Rancangan Renja PD. Tahapan selanjutnya adalah dilakukannya Verifikasi dan Validasi bersama PD Pengusul Renja. Setelah terjadi kesepakatan terkait program/kegiatan, indikator, lokasi serta pagu anggaran maka Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di Kabupaten Flores Timur, RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022. Proses selanjutnya bagi Perangkat Daerah adalah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan dokumen RKPD yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur maka Kantor Camat Solor Selatan juga berkewajiban menyampaikan dokumen penyempurnaan sebagaimana dimaksud.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan operasional yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Penyempurnaan Rancangan Renja PD Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 7. Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2017-2022.
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyempurnaan Rancangan Renja PD Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2022 adalah untuk mempertajam indikator, target, sasaran serta anggaran dari setiap program dan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2022 adalah:

1. Untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan anggaran.
2. Untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi dan kebutuhan Perangkat Daerah, khususnya Kantor Camat Solor Selatan dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Dokumen Penyempurnaan Rancangan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja

Bagian ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2020.

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kantor Camat Solor Selatan

Memuat tentang Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran dari Kantor Camat Solor Selatan.

BAB VI: Kerangka Pendanaan

Memuat tentang Perbandingan Kerangka Pendanaan antara Rancangan Awal RKPD, Renja PD dan RKPD.

BAB V : Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Dalam penerapan otonomi daerah di Kabupaten Flores Timur, Kantor Camat Solor Selatan diberi kewenangan untuk melaksanakan Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berkaitan dengan Visi dan Misi Daerah, tentunya sebagai Perangkat Daerah yang berada di wilayah dan mengkoordinasikan Desa maka Kantor Camat Solor Selatan berupaya mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang tergambar dalam program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Pada BAB ini, akan diuraikan evaluasi terhadap konsistensi program dan kegiatan serta capaian kinerja dan anggaran baik antara Renja Tahun 2020, RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, dan juga Renstra Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2017-2022, demikian halnya dengan tahun anggaran berjalan atau Tahun 2021.

Dalam dokumen Renja Tahun 2020, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah terakomodir dalam RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dan masuk kedalam dokumen pelaksanaan dan anggaran Tahun 2020. Pada Tahun 2020, Kantor Camat Solor Selatan diberikan anggaran sebesar Rp 1.377.382.164,- untuk membiayai 4 program dan 20 kegiatan. Seluruhnya dapat dilaksanakan meski ada beberapa hambatan namun dapat diatasi sehingga dapat disampaikan bahwa Kantor Camat Solor Selatan dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk Tahun 2021 ini, Kantor Camat Solor Selatan diberikan anggaran sebesar Rp 1.325.333.972,- untuk membiayai 3 program dan 22 kegiatan. Evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT SOLOK SELATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3 = 2018,2019)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun			Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun Berjalan 2021	
					Target Renja (n-2)	Realisasi Renja (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10x4
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01	Pencapaian, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.01.06	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, LKRPJ, Renja, Renstra, Calk (Dokumen)	7	0	13	13	100	6	19	68
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)	14	24	12	12	100	14	50	89
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	24	12	12	100	12	48	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek (Orang)	2	0	0	0	100	2	2	25
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (jenis)	6	18	7	7	100	12	37	154
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	5	0	2	2	100	4	6	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang Disediakan (Unit)	3	0	1	1	100	4	5	42
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Bahan Kebersihan yang Disediakan (Jenis)	19	30	20	20	100	32	82	108
		Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)	29	124	51	51	100	32	207	178
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar/Buku)	37500	55.000;75	16.500 : 30	16.500 : 30	100	32.000	103.500;105	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang Disediakan (Jenis)	1	2	0	0	100	2	4	100
7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (Dosa)	250	850	360	360	100	240	1450	145
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	25	206	175	175	100	100	481	481
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	100	0	0	0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat (Jenis)	3	0	0	0	100	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya yang disediakan (Jenis)	100	650	120	120	100	120	890	223
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Bulan)	12	24	12	12	100	12	48	100

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Paket)	9	24	12	12	100	12	48	133
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa									
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan / Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)	7	14	7	7	100	7	28	100
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan (Kali)	2	2	1	1	100	1	4	50

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN

Untuk menganalisis kinerja pelayanan pada Kantor Camat Solor Selatan maka perlu di ketahui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Namun perlu disampaikan bahwa pelaksanaan urusan baik wajib maupun pilihan masih berada pada Perangkat Daerah Kabupaten. Kecamatan belum diberikan sebagian kewenangan untuk melaksanakan urusan di tingkat kecamatan sehingga kecamatan hanya melaksanakan program/kegiatan rutin kantor sebagaimana tergambar pada table berikut:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT SOLOK SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
					Tahun 2020 n-2	Tahun 2021 n-1	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 n-2	Tahun 2021 n-1	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG/				6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, LKPPJ, Renja, Renstra, Calik (Dokumen)			13	6	7	5	13		5	5	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)			12	14	14	14	12		14	14	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Varifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)			12	12	12	12	12		12	12	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian												
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek (Orang)			0	2	2	3	0		3	4	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum												
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (Jenis)			7	12	6	10	7		10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)			2	4	5		2		3		4
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)			1	4	3	3	1		3	4	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Bahan Kebersihan yang Disediakan (Jenis)			20	32	19	19	20		19	20	
		Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)			51	32	29	29	51		29	30	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar/Buku)			16.500 : 30	32.000	37500	30000	16.500 : 30		30.000	30.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang Disediakan (Jenis)			0	2	1	1	0		1	1	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (Dos)			360	240	250	300	360		300	300	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi (Kali)			175	100	25	25	175		25	25	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Disediakan (Unit)			0	0	1	1	0		1	1	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat (Jenis)			0	0	3	20	0		20	20	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya yang disediakan (Jenis)			120	120	100	350	120		350	350	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Kali)			12	12	25	25	12		25	25	
7.01.05	PROGRAM PENGELANGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
7.01.05.2.01	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah												
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Paket)			12	12	9	12	12		12	12	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA												
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa												
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan	Jumlah Pendampingan / Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)			7	7	7	7	7		7	7	
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan (Kali)			1	1	2	2	1		1	1	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan dengan fungsi yakni:

- a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Camat dibantu oleh Sekretariat dan 5 Seksi. Dengan dukungan Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 19 orang, dapat digambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Solor Selatan pada Tahun 2020 berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti sehingga capaian kinerja program dan kegiatan bisa mencapai 100%. Sedangkan untuk tahun berjalan atau tahun 2021, dari 4 Program 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan diproyeksikan bahwa target kinerjanya pun dapat dicapai sampai 100%.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Mencermati Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dan berdasarkan analisa kebutuhan pada Kantor Camat Solor Selatan, dilakukan review pada beberapa sub kegiatan baik berkaitan dengan pagu indikatif maupun target kinerja yang ditetapkan, seperti tergambar sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan Indikator Kinerja Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat, hanya dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000,- dengan target kinerja 4 jenis. Perlu disampaikan bahwa Rumah Dinas Camat dibangun sejak Tahun 2017 sehingga dalam

Renstra Kantor Camat Solor Selatan telah direncanakan penyediaan perlengkapan rumah dinas camat namun dengan berbagai pertimbangan, tidak dianggarkan sampai dengan tahun 2021. Untuk itu disamping demi menjawab tercapainya target Renstra Kantor Camat Solor Selatan, juga demi menjaga kualitas bangunan yang sudah dibangun dan tidak ditempati karena tidak tersedianya fasilitas pendukung maka dilakukan review agar Pagu Indikatif untuk sub kegiatan ini dinaikan menjadi Rp. 50.000.000,- dengan target kinerja 20 jenis peralatan dan perlengkapan rumah dinas agar rumah dinas ini dapat dimanfaatkan.

2. Target Kinerja pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang semula ditargetkan 6 Dokumen namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, tidak ada lagi kewajiban Pemerintah Kecamatan untuk menyusun LPPD maka untuk dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disiapkan pada tahun 2022 yang akan datang hanya 5 dokumen yakni LKPJ, Renja, Laporan Keuangan Semester dan Tahunan.
3. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, pada Rancangan Awal RKPD diberikan pagu indikatif sebesar Rp.12.500.000,- dengan target kinerja 12 orang. Jika dilihat dari besaran standar biaya perjalanan dinas luar daerah maka target kinerja tersebut terlampaui tinggi maka dilakukan review target kinerja menjadi 3 orang dan target anggaran dinaikan menjadi Rp 15.000.000,- Perlu disampaikan bahwa Bimtek ini penting sehubungan dengan perkembangan regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan desa yang membutuhkan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan respon terhadap persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Target Kinerja pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ditargetkan sebesar 6 jenis, sehubungan dengan terdapatnya 3 lokal bangunan pada Kantor Camat Solor Selatan dan wilayah yang sangat dekat dengan laut

maka rentan menjadi karat dan rusak sehingga target kinerja dinaikkan menjadi 10 jenis.

Adapun hasil review antara Rancangan Awal RKPD dan Analisa Kebutuhan, terlihat pada table berikut ini:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	9	10	11	12		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, LKPD, Renja, Renstra, CalK (Dokumen)	7	27,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, LKPD, Renja, Renstra, CalK (Dokumen)	5	27,500,000			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)	14	980,665,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)	14	980,665,000			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	28,990,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	28,990,500			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek (Orang)	12	12,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek (Orang)	3	15,000,000	Pertu Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (jenis)	6	2,250,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (jenis)	10	2,250,000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	2	6,700,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	3	15,850,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	3	9,150,000			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	3		
			Jumlah Alat/Bahan Kebersihan yang Disediakan (Jenis)	19	3,200,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat/Bahan Kebersihan yang Disediakan (Jenis)	19	12,700,000	
			Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)	29	9,500,000			Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)	29		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	30,000;50	12,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	30,000	12,000,000	
								Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bacaan yang Disediakan (Jenis)	1	990,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bacaan yang Disediakan (Jenis)	1	990,000	
	Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (Dos)	300	18,000,000	Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (Dos)	300	18,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	25	27,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	25	27,500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan (Unit)	1	27,500,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan (Unit)	1	27,500,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat (Jenis)	3	5,400,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat (Jenis)	20	50,000,000	rumah Dinas Sudah dibangun 3 tahun tanpa sarpras, jika dibiarkan kosong maka banggunany
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya yang disediakan (Jenis)	350	950,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya yang disediakan (Jenis)	350	950,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Bulan)	12	10,100,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Bulan)	12	10,100,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang Disediakan (Orang)	6	82,950,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang Disediakan (Orang)	6	82,950,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dilayani Perizinan (Unit)	3	3,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dilayani Perizinan (Unit)	6	10,750,000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara (Unit)	4	7,500,000			Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara (Unit)	6		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang Dipelihara (Unit)	1	9,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang Dipelihara (Unit)	1	9,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	5	3,025,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	5	3,025,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (kali)	25	55,500,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (kali)	25	55,500,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitasi kegiatan Pemerintahan, Pelayanan kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Paket)	12	60,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitasi kegiatan Pemerintahan, Pelayanan kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Paket)	12	60,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa					
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Pendampingan / Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa (Desa)	7	30,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Pendampingan / Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa (Desa)	7	30,000,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Musrenbang kecamatan (kali)	2	30,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Musrenbang kecamatan (kali)	2	30,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP Tahun 2022 dirumuskan dalam tema: “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif” Tema tersebut dijalankan dalam tujuh prioritas yakni (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.

Kebijakan nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Ada tiga fokus dari pembangunan nasional tahun 2022 yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur, yakni Transformasi Ekonomi, Pemulihan dan Perkuatan. Dari kebijakan nasional ini, Provinsi NTT menetapkan arah dan prioritas dengan tema *“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah”*. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan tahun 2022 yakni: (1) Memperkuat infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting; (2) Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik; (3) Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat; (4) Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah, (5) Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi, dan (6) Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon.

Mencermati Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT tersebut diatas, dihubungkan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Kantor Camat Solor selatan serta program kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2022 maka dapat dikatakan bahwa Kantor Camat Solor berfungsi untuk menyiapkan sasaran atau penerima manfaat di tingkat akar rumput agar benar-benar siap untuk mendukung program/kegiatan yang diturunkan dari pemerintah tingkat atas baik provinsi maupun pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Solor Selatan Tahun 2022 tentunya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur. Jika dilihat dari Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran maka Kantor Camat Solor Selatan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan turut mendukung pencapaian Misi Reformasi Birokrasi yang tergambar dalam program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ada di daerah, Kantor Camat Solor Selatan juga menjabarkannya dalam program/kegiatan dengan melibatkan Forum Pimpinan Kecamatan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Disamping itu Kantor Camat Solor Selatan juga merencanakan program/kegiatan yang mendukung terwujudnya desa berkembang dan desa maju.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan atau Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2022 sama dengan Rencana Awal RKPD yang ditetapkan yakni sebanyak 4 Program 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan Pagu sebesar Rp 1.447.010.000,- Detail Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tergambar pada tabel berikut:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

No	Urusan /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.292.910.000				1.269.851.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000				27.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, Renja, Renstra, Calik (Dokumen)	Kalike	7	25.000.000	DAU		7	27.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.006.265				1.106.891.500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kalike	14	980.665.000	DAU		14	1029.698.250
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali) Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	Kalike	12	25.600.000	DAU		12	28.160.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.500.000				13.750.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek (Orang)	Kupang	3	12.500.000	DAU		3	13.750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.120.000				101.332.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (Jenis)	Kalike	10	2.250.000	DAU		10	2.475.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	Kalike	2	12.150.000	DAU		1	9.000.000
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	Kalike	3	5.700.000			2	4.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Bahan Kebersihan yang Disediakan (Jenis)	Kalike	19	3.200.000	DAU		21	3.520.000
			Kalike	29	10.800.000			30	11.880.000
		Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)	Kalike						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggunaan (Lembar/Buku)	Kalike	37.500	15.500.000	DAU			17.050.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.500.000				44.550.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				40.500.000				44.550.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Kali)	Tersebar	25	40.500.000	DAU		29	44.550.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				56.600.000				62.260.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah				56.600.000				62.260.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Paket)	Tersebar	9	56.600.000	DAU		9	62.260.000
					57.000.000				62.700.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA				57.000.000				62.700.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa				27.000.000	DAU		7	29.700.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan / Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)	Tersebar	7	27.000.000	DAU		7	29.700.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan (Kali)	Tersebar	2	30.000.000	DAU		2	33.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini akan diuraikan tentang Perbandingan Rencana Kerja dan Pendanaan antara Ranwal RKPD, Renja PD dan RKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Renja, Ranwal RKPD dan RKPD tidak berubah, yang disesuaikan hanyalah pada Lokasi, Indikator, Target Kinerja serta Pagu Anggaran pada beberapa Sub Kegiatan. Adapun besaran pagu anggaran untuk ketiga dokumen dimaksud, secara berturut-turut yakni Ranwal sebesar Rp1.464.620.500,- Rancangan Renja sebesar Rp 1.511.720.500,- dan RKPD sebesar Rp 1.447.010.000,- Untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan yakni:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 27.500.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 27.500.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 25.000.000,-

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan yakni:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 980.665.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 980.665.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 980.665.000,-

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 28.990.500,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 28.990.500,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 25.600.000,-

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 Sub Kegiatan yakni:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 12.500.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 15.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 12.500.000,-
D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 Sub Kegiatan, yakni:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 2.250.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 2.250.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 2.250.000,-

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 15.850.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 15.850.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 17.850.000,-

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 12.700.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 12.700.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 14.000.000,-

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 12.000.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 12.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 15.500.000,-

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 990.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 990.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 1.020.000,-

6. Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 18.000.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 18.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 15.000.000,-

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 27.500.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 27.500.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 26.500.000,-

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan, yakni:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 27.500.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 27.500.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 25.500.000,-

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 5.400.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 50.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 18.700.000,-

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan, yakni:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 950.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 950.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 1.200.000,-

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 10.100.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 10.100.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 10.100.000,-

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 82.950.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 82.950.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 83.000.000,-

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 Sub Kegiatan, yakni:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 10.750.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 10.750.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 9.000.000,-

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 9.500.000

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 9.500.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 6.500.000,-

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 3.025.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 3.025.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 3.025.000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan 1 Sub Kegiatan, yakni:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 55.500.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 55.500.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 40.500.000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan 1 Sub Kegiatan, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 60.000.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 60.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 56.600.000,-

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan 2 Sub Kegiatan, yakni:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 30.000.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 30.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 27.000.000,-

2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Pagu Anggaran pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 30.000.000,-

Pagu Anggaran pada Renja PD sebesar Rp 30.000.000,-

Pagu Anggaran pada RKPD sebesar Rp 30.000.000,-

BAB V

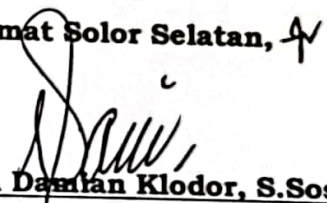
PENUTUP

Demikianlah Dokumen Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2022, semoga berguna sebagai salah satu masukan bagi para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2022.

Renja PD Tahun 2022 ini merupakan rencana tahunan terakhir untuk Periode Renstra 2018-2022. Semoga apa yang termuat dalam Penyempurnaan ini dapat terakomodir sepenuhnya demi pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Akhirnya, kami mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga teman-teman yang telah mendukung penyusunan dokumen penyempurnaan Renja PD ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan kinerja kita semua. Sekian dan terima kasih.

Kalike, Agustus 2021

Camat Solor Selatan, 

Yoseph Damian Klodor, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196602201999031003